

KURIKULUM 2013 (Berpijak Pada Dua Tradisi Yang Bertentangan)

AENG MUHIDIN

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang.

dosen00736@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kurikulum sejarah 2013 adalah gabungan tradisi utama dan tradisi alternatif yang bertentangan. Tradisi utama memfokuskan pada penanaman moral, materi sejarah politik dan metode mengajar klarifikasi, penalaran dan penilaian moral. Tantangan penerapan tradisi utama yaitu: 1) penentuan nilai; 2) pemilihan topik; 3) iklim belajar. Tradisi alternatif sebagai kritik atas tradisi utama. Tradisi utama memfokuskan pada kecakapan literatur sejarah, materi pengetahuan sejarah, dan metode yang didasarkan pada prinsip belajar. Tantangan utama penerapan tradisi alternatif adalah penguasaan disiplin ilmu dan metode pembelajaran. Akibat menggabungkan dua tradisi, rumusan kompetensi Sikap (Agama dan Sosial) yaitu nilai moral, sementara Kompetensi Pengetahuan dari tradisi alternatif. Sebagai akibatnya, Kurikulum Sejarah 2013 tidak terpadu karena tidak ada keterkaitan antar-Kompetensi Pengetahuan-Sikap dan Keterampilan. Guru harus mengambil keputusan terbaik berdasarkan justifikasi seorang profesional.

Kata kunci: kurikulum, pendekatan pembelajaran, pembelajaran berorientasi nilai, intelektual.

PENDAHULUAN

Ada dua pendekatan pembelajaran sejarah yang silih berganti memberikan corak dalam kurikulum sejarah di seluruh negara, yaitu tradisi utama dan tradisi alternatif. Pembelajaran sejarah di sekolah menurut tradisi utama harus diorientasikan pada nilai, termasuk nilai-nilai moral, sedangkan menurut alternatif harus dioreintasikan pada

intelektual. Kedua tradisi itu saling bertentangan satu sama lain. Ada tiga hal yang membedakan kedua tradisi yaitu: 1) tujuan pembelajaran sejarah; 2) materi pelajaran, dan; 3) pendekatan pembelajaran. Logika kurikulum bahwa pemilihan materi pelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, bukan sebaliknya serta pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan dan materi.

Mengingat pentingnya guru menerapkan pembelajaran yang mampu merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik, Kurikulum 2013 menghendaki rumusan kompetensi terpadu antara Pengetahuan-Sikap-Keterampilan (disingkat P-S-K), tetapi gagal. Penulis berasumsi kegagalan itu bersumber dari keinginan memadukan dua tradisi dalam pembelajaran sejarah yang bertentangan. Sebagai usaha untuk membuktikan asumsi, penulis perlu untuk menguraikan tiga topik, yaitu: 1) karakteristik tradisi utama dalam pendekatan pembelajaran sejarah; 2) karakteristik tradisi alternatif dalam pendekatan pembelajaran sejarah; dan 3) masalah yang muncul dari pemaduan kedua tradisi dalam kurikulum 2013.

Terbentuknya Dua Tradisi Pendekatan Pembelajaran Sejarah Yang Bertolak Belakang

Munculnya dua kutub yang bertentangan mengenai kedudukan ilmu sejarah sebagai ilmu humaniora atau sebagai ilmu sosial berimplikasi pada pendekatan pembelajaran sejarah di sekolah. Para pendukung sejarah sebagai ilmu humaniora mengajukan pendekatan tradisi utama, sedangkan di pihak lain muncul keinginan untuk menerapkan pendekatan tradisi alternatif. Kedua tradisi sama-sama menyepakati bahwa sejarah berfungsi sebagai alat pendidikan. Untuk mencapai tujuan apa penggunaan alat pendidikan itu, kedua tradisi saling

mengklaim tujuan yang paling ideal pembelajaran sejarah di sekolah.

Penempatan sejarah sebagai ilmu humaniora dan sejarah sebagai ilmu sosial merupakan pertentangan filosofis pada tiga landasan keilmuan, yaitu persoalan objek kajian ilmu (*ontologi*), metode (epistemologi), dan manfaat ilmu (aksiologi). Berdasarkan landasan filosofi itu, ilmu terbagi menjadi tiga yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Kedudukan *Sejarah* terbelah dua, sebagai ilmu humaniora, juga sebagai ilmu sosial. Pertentangan mengenai kedudukan sejarah sebagai ilmu humaniora atau ilmu sosial berimbas pada pendekatan pembelajaran sejarah di sekolah (Lihat Gambar 1).

Para pendukung sejarah sebagai ilmu humaniora menghendaki pembelajaran sejarah harus berorientasi nilai, sedangkan pihak pendukung sejarah sebagai ilmu sosial menghendaki pembelajaran sejarah harus berorientasi intelektual. Pendukung orientasi perubahan nilai mengajukan pendekatan tradisi utama dalam pembelajaran sekolah dan sudah terlebih dahulu menanamkan pengaruh dalam sistem pendidikan di sekolah. Sedangkan pihak pendukung orientasi perubahan intelektual mengajukan pendekatan tradisi alternatif dalam pembelajaran sejarah. Tradisi alternatif muncul belakangan dan sebagai pihak yang mengkritik pendukung tradisi utama. Kedua tradisi pembelajaran sejarah, secara substansial mengajukan konsepsi yang berbeda tentang tiga hal,

yaitu: 1) sejarah apa, 2) mengapa dan untuk apa sejarah harus diajarkan, dan; 3) harus seperti apa sejarah diajarkan.

Pendekatan Pembelajaran Menurut Tradisi Utama dan Tantangan

Untuk memahami pendekatan pembelajaran sejarah menurut tradisi utama, ada tiga hal yang harus dipahami, yaitu: 1) untuk apa sejarah (tujuan), 2) sejarah apa (materi), 3) bagaimana dan mengapa sejarah harus diajarkan (metode).

Dalam hal tujuan, tradisi utama menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sejarah harus berorientasi pada nilai. Ada dua varian orientasi nilai, yaitu: 1) nilai intrinsik sejarah nasional yang berkaitan dengan nilai budaya nasional, dan; 2) nilai moral. Para pendukung tradisi utama menganggap perlu mengakuisisi pengetahuan yang relatif kompleks tentang budaya politik nasional yang telah diasumsikan sebelumnya ke dalam kurikulum sejarah. Masih menurut tradisi utama, tujuan pembelajaran sejarah adalah mempromosikan nilai moral dan mengembangkan pemahaman moral peserta didik. Moral berkaitan dengan standar perilaku yang baik dan buruk, seperti *keterbukaan*, *keadilan* dan *kejujuran*.

Mengingat materi sejarah harus sesuai dengan tujuan, maka materi sejarah harus dipilih dan ditentukan.

Jenis materi menurut varian pertama tradisi utama adalah sejarah politik [*negara*]. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, materi sejarah harus

diorganisir secara kronologis dari masa kuno sampai masa kontemporer. Biasanya referensi yang digunakan terdiri dari buku teks yang disuling dari sumber sekunder (buku) lainnya. Meskipun ada analisis kritis atas bukti sejarah, tetapi sedikit sekali. Metodologi penyusunan laporan itu sendiri tidak menyiratkan ideologi politik tertentu, tetapi selalu mengacu pada karya-karya yang diakui pihak berwenang.

Collingwood menggunakan istilah *Sejarah Cutting-Paste* (SCP) untuk jenis sejarah yang ditentukan oleh pihak berwenang.¹ Sejarawan SCP yang tergantung pada penilaian layak atau tidak layak tidak dapat dikatakan sejarawan otonom.²

Dalam hal pedagogi, tradisi utama menuntut peran aktif seorang guru secara didaktif. Pentingnya keterlibatan moral di dalam pembelajaran sejarah secara umum diakui dan hasilnya dapat diukur karena moral adalah dasar untuk guru dan murid mereka memahami sifat subjek (tindakan dan perilaku para pelaku sejarah).³ Ada tiga jenis pembelajaran sejarah menurut tradisi utama, yaitu *pemahaman kosakata moral* dari setiap materi sejarah, terbentuknya *penilaian moral* atas dasar bukti-bukti dan penyelidikan sejarah, dan penggunaan kosakata moral dalam mendiskusikan dan

¹ Collingwood, R.G. *The Idea of History*. (Oxford: OUP 1993), h.h. 257-266.

² *Ibid.*

³ Barton, K. C. and Levstik, L. S. *Teaching History for the Common Good*. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h. 106.

memahami materi sejarah.⁴ Guru sejarah harus mampu membangun interpretasi aktif sejarah. Keahlian pedagogik guru sejarah terletak pada kemampuan menghubungkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan pada materi ajar dan menyampaikan penjelasan sejarah sesuai dengan kepentingan politik.

Konsekuensi, peran pelajar bersifat pasif. Siswa hanya perlu mengasimilasi, mengatur dan mereproduksi, paling tidak untuk menafsirkan interpretasi guru. Secara metodik siswa diajak untuk mengapresiasi secara kritis persamaan dan perbedaan antara kosakata moral dan nilai-nilai moral masyarakat dalam periode sejarah dan masyarakat kontemporer. Kemampuan siswa untuk merefleksikan secara kritis pertanyaan moral dan isu-isu sebagai bagian dari studi mereka tidak hanya integral pada pendidikan sejarah tetapi juga integral dengan disiplin sejarah itu sendiri. Arthur et.al. yang mengklaim bahwa tidak ada yang dapat mempelajari sejarah secara efektif tanpa melibatkan pertimbangan moral atau keputusan moral.⁵ Walsh menegaskan bahwa penolakan perjumpaan antara etika dan sejarah adalah penolakan yang spontan, perjumpaan itu sebenarnya ada dalam sejarah, baik sebagai subjek disiplin maupun sebagai tujuan pendidikan

sejarah. Sama seperti penelitian sejarah dan interpretasi sejarawan, penilaian moral dalam pembelajaran sejarah harus dilakukan secara hati-hati karena menuntut kepastian dan harus meyakinkan.⁶

Pendekatan pembelajaran tradisi utama banyak ditentang. Menurut Smith, integrasi moral ke dalam sejarah merugikan sejarah sebagai disiplin, maka tujuan pendidikan sejarah harus difokuskan pada pengajaran kapasitas seperti sejarawan. Smith membedakan tiga jenis nilai, yaitu *nilai perilaku*, *nilai prosedural*, dan *nilai substantif*.⁷ *Nilai perilaku* adalah nilai yang dibutuhkan untuk lingkungan belajar yang produktif misalnya jenis nilai yang diperlukan untuk diskusi kelas dan perdebatan, seperti toleransi, menghargai pendapat dan lainnya. *Nilai-nilai prosedural* adalah keterampilan dan teknik utama yang digunakan oleh seorang sejarawan, seperti berpikir kritis, kemampuan interpretasi bukti dan keinginan untuk menginterogasi argumen dan gagasan. Jenis ketiga adalah *nilai-nilai substantif*. Nilai substantif, arti yang ditentukan dan diberikan atas tindakan, pikiran dan perasaan dan umumnya melibatkan pertimbangan moral. Pembelajaran sejarah harus membatasi

⁴ Arthur, J., Davies, I., Kerr, D. and Wrenn, A. *Citizenship Through Secondary History*. (Routledge: London, 200), h. 88.

⁵ Arthur, J., Davies, I., Kerr, D. and Wrenn, A. *Citizenship Through Secondary History*. (Routledge: London, 200), h. 96.

⁶ Walsh, P. *Education and Meaning: Philosophy in Practice*. (London: Cassell, 1993), h. 180.

⁷ Smith, R. I. "Values in history and social studies", dalam Tomlinson, P. Dan M. Quinton. Eds. *Values Across the Curriculum*. (London: Falmer Press, 1986), h. 82.

diri pada *nilai-nilai perilaku* dan *prosedural*, nilai substantif tidak dibutuhkan dan harus dibuang. Smith menolak guru dalam menginterpretasikan nilai moral. Kalaupun nilai moral itu ada, guru harus netral dan menghormati otonomi siswa untuk mengembangkan perspektif mereka sendiri atas *nilai moral* dalam materi sejarah.

Menurut Lee, ada perbedaan antara tujuan sejarah sebagai subjek kajian dan tujuan sejarah sebagai tujuan pendidikan. Tujuan sejarah sebagai subjek kajian harus diprioritaskan dan tidak menjadi bawahan dari tujuan pendidikan sejarah. Jika tujuan pendidikan sejarah itu berorientasi moral, sejarah sebagai kajian tidak boleh digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan, karena eksplorasi moral dapat menggerus objektivitas dan rasionalitas sejarawan. Kinloch mengamati bahwa guru sejarah cenderung berfokus pada isu moral pada akhirnya hanya mampu memberikan hasil paling dangkal berupa kesimpulan moral yang justru mengorbankan hasil penelitian sejarah.⁸

Tidak hanya itu, menurut Kinloch, eksplorasi dan penilaian nilai-nilai (moral) biasanya dilakukan dengan cara yang sempit dan tidak kritis. Seringkali peserta didik dalam pengajaran sejarah harus menerima moral mentah. Pengajaran sejarah

seringkali tidak mengajak siswa untuk mempertanyakan nilai-nilai dan etika moral tentang orang-orang, budaya, ide dan keyakinan pada periode sejarah yang dipelajari. Kinloch menghendaki bahwa pendidikan sejarah harus difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan sejarah (*apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana hal itu terjadi*), bukan pada pertanyaan benar atau salah.

Menurut Walsh, komentator seperti Lee dan Kinloch tidak mampu membedakan antara penilaian sejarah dan pertimbangan moral. Keliru jika mereka beranggapan bahwa penilaian sejarah harus melepaskan pertimbangan moral. Kalau Lee dan Kinloch menanggapi pertimbangan moral itu subyektif-emosional, justru menurut EH Carr, fakta sejarah mengandaikan beberapa ukuran interpretasi dan interpretasi sejarah selalu melibatkan penilaian moral.⁹ Salmon menjelaskan dengan melibatkan siswa dalam penyelidikan sejarah yang ketat, siswa dapat memahami kompleksitas dunia hanya dengan memahami bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pilihan yang benar. Menurut Salmon, tindakan seseorang (atau sikap diam seseorang) dinilai dalam konteks periode sejarah yang dipelajari dan kemudian siswa dapat menarik pelajaran yang berarti untuk hari ini.¹⁰

⁸ Kinloch, N. "Parallel catastrophes? Uniqueness, redemption and the Shoah", *Teaching History*, 2001, h. 104.

⁹ Carr, E. H. *What is History?* (London: Penguin, 1961), h. 79.

¹⁰ Salmons, P. "Teaching or preaching? The Holocaust and intercultural education in the

Menanggapi kritik bahwa penilaian moral menggerus objektivitas, Arthur et al. menunjukkan bahwa penilaian moral juga objektif, karena penilaian seperti itu melibatkan penilaian yang ketat atas bukti sejarah.¹¹ Pembelajaran moral dalam sejarah yang melibatkan penalaran moral dan penilaian moral, bukan berarti tidak melibatkan penilaian atas bukti sejarah. Bahwa pembelajaran moral dalam sejarah didasarkan pada penelitian sejarah yang baik agar menjadi signifikan dan efektif, menurut Arthur, *et.al.*, bukanlah berarti harus menentang penempatan moral dalam kurikulum sejarah. Pembelajaran moral dalam sejarah justru memperkuat sifat sejarah sebagai disiplin ilmu, bukan melemahkan.

Menghadapi kritik Kinloch, Arthur mengatakan “jikalau pembelajaran moral dalam pembelajaran sejarah masih terdapat kekurangan, bukan berarti harus ditolak sama sekali, di situlah perlu ada diskusi dan perdebatan tentang praktik terbaik yang harus dilaksanakan, ada kebutuhan untuk memperjelas cara terbaik guru dalam membelajarkan sejarah dan bagaimana cara siswa menghadapi nilai-nilai moral dalam kelas sejarah serta memperjelas alasan mengapa siswa perlu melakukannya.

Menerapkan tradisi utama tidak mudah. Setidaknya, ada tiga tantangan yang harus dihadapi guru. **Pertama**, karena tidak ada daftar nilai-nilai yang dapat dirujuk, guru sejarah harus mampu menentukan nilai-nilai. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 1) nilai-nilai itu harus dapat dieksplorasi, 2) nilai-nilai itu harus dipahami oleh siswa. Jenis nilai-nilai yang memenuhi kedua syarat itu adalah 1) nilai-nilai moral yang berguna untuk masyarakat kontemporer; 2) nilai-nilai moral pribadi yang dapat disebarluaskan; dan 3) nilai-nilai yang menjadi wacana sehari-hari dalam masyarakat.¹² Hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan nilai-nilai adalah perbedaan latar belakang budaya dan variasi nilai (bersifat sementara dan berakar kuat) antara kelompok budaya satu dengan yang lain.¹³ Guru sejarah sebaiknya tidak mengisolasi, sebaliknya perlu membiasakan diri ikut ambil bagian dalam perdebatan jenis nilai-nilai moral yang harus ada dalam kurikulum sejarah.

Kedua, tantangan lain terkait pemilihan topik dan tema. Mengingat pengajaran moral dalam pembelajaran sejarah menggunakan materi sejarah untuk tujuan eksplorasi moral, pemilihan topik dan tema yang mendukung pada pencapaian tujuan

UK”, *Intercultural Education*, 2003: 139-149 (143).

¹¹ Arthur, J., Davies, I., Kerr, D. and Wrenn, A. *Citizenship Through Secondary History*. (Routledge: London, 200), h. 98.

¹² Walsh, P. *Education and Meaning: Philosophy in Practice*. (London: Cassell, 1993), h. 180.

¹³ Barton, K. C. and Levstik, L. S. *Teaching History for the Common Good*. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h. 107.

begitu penting. Sebagaimana dikemukakan Walsh bahwa setiap kurikulum sejarah harus melibatkan pembelajaran moral yang berdasarkan nilai-nilai yang telah dipilih atau ditolak pada topik atau tema yang akan dipelajari.¹⁴ Jadi, untuk mengembangkan pembelajaran sejarah berorientasi moral, guru sejarah harus hati-hati mempertimbangkan kesesuaian etis antara nilai-nilai yang dipilih dan nilai-nilai yang dimiliki siswa.

Ketiga, sebagaimana dikemukakan Maxwell bahwa sebagian besar nilai pendidikan yang diajarkan dalam pendidikan sejarah kebanyakan tanpa berlandaskan dasar teoritis¹⁵. Berangkat dari kritik Maxwell, ada tiga bentuk tawaran yang dapat digunakan yaitu klarifikasi nilai-nilai, penalaran moral dan pendidikan karakter.¹⁶ Dalam menerapkan ketiga pendekatan itu, guru sejarah ditantang untuk mampu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa membentuk pandangan mereka sendiri tentang isu moral yang dipelajari dari materi sejarah serta menghormati otonomi moral siswa dan tidak memihak.

Keempat, parameter keberhasilan ketiga pendekatan pembelajaran moral dilihat dari ada atau tidaknya hubungan yang positif antara moral dan tindakan. Pendekatan

pembelajaran moral dalam pembelajaran sejarah harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman moral dalam bentuk praktek. Untuk itu, guru harus menciptakan iklim kelas yang kondusif dan melibatkan murid dalam diskusi, debat dan kegiatan menulis analitis-reflektif. Sementara itu, belum ada penelitian khusus yang mampu hubungan antara subjek dan pendekatan terbaik yang dapat dijadikan model bagi guru sejarah. Sampai saat ini, hampir dikatakan belum ada sumber-sumber referensi yang secara eksplisit berusaha membantu guru sejarah menerapkan metode dan strategi pengajaran moral yang baik

Pendekatan Pembelajaran Menurut Tradisi Alternatif dan Tantangan

Tradisi alternatif mengklaim bahwa pembelajaran sejarah akan kehilangan tujuan sebenarnya jika difokuskan pada berorientasi moral (*nilai substantif*). Pendidikan sejarah yang difokuskan pada pendidikan nilai dan moral didasarkan pada argumentasi yang begitu lemah. *Kedua*, ketakutan akan pembelajaran sejarah yang memperdebatkan hal-hal yang serius mengakibatkan pembelajaran diarahkan pada pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan yang kehilangan kontak dengan tujuan disiplin sejarah.

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan, materi dan pendekatan pembelajaran menurut tradisi alternatif yang berbeda dari tradisi utama.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 80.

¹⁶ Halstead, M. and Taylor, M. "Learning and teaching about values". *Cambridge Journal of Education*, 2000: 169-202 (132).

Dalam hal tujuan, tradisi alternatif mengatakan bahwa tujuan sejarah harus dilepaskan dari tujuan yang berada di luar pengetahuan sejarah itu sendiri. Tujuan pembelajaran sejarah harus membekali siswa dengan pengetahuan sejarah, bukan yang lain. Tujuan pembelajaran sejarah menurut tradisi alternatif adalah membentuk kecakapan literatur sejarah. Ada tiga jenis pengetahuan sejarah untuk mencapai kecakapan literatur. *Pertama*, pengetahuan tentang disiplin ilmu sejarah dan konsep-konsep kunci yang membuat sejarah itu ada termasuk pengetahuan tentang bagaimana kita tahu, menjelaskan dan memberikan penjelasan atas masa lalu. *Kedua*, pengetahuan prosedural tentang *metodologi* dan *historiografi*. Dalam pemahaman metodologi dan historiografi, siswa harus dapat: 1) menentukan keabsahan cerita dan kebenaran faktual; 2) memahami konsep bukti dan menghargai bukti sejarah; 2) mau menceritakan kisah yang bertolak belakang; 3) menghormati orang-orang di masa lalu termasuk pahlawan. *Ketiga*, pengetahuan meta-historis. Pendidikan sejarah harus membantu siswa agar: 1) meninggalkan pandangan *diskriminasi temporal*, dapat menemukan keberadaan diri dalam waktu kini dan melihat masa lalu dapat menghambat dan membuka kemungkinan di masa depan; 2) mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masa kini. Kemampuan itu berkaitan dengan

pengetahuan substantif yang disebut *meta-historis*.

Dalam hal materi, menurut tradisi alternatif adalah sejarah sebagai disiplin ilmu sejarah. Karakter khusus dari disiplin ilmu sejarah adalah *kesadaran sejarah*. Kesadaran sejarah adalah bentuk pengetahuan sejarah yang mencoba untuk mencapai standar kebenaran (fakta) dan validitas dalam pernyataan dan narasi sejarah.¹⁷ Disiplin sejarah dapat dianggap sebagai tradisi metakognitif terorganisir yang menekankan pada kegiatan praktis yang merefleksikan apa yang dikerjakan sejarawan, menilai apakah pernyataan yang sejarawan kemukakan itu benar dan mengapa begitu.

Ada tiga jenis materi menurut tradisi alternatif. *Materi pertama* adalah konsep kunci ilmu sejarah. Pengetahuan sejarah membutuhkan pemahaman konsep yang berbeda sama sekali berbeda dari gagasan sehari-hari yang membuat pengetahuan akan masa lalu itu mustahil ada. Justru dalam pembelajaran moral yang memfokuskan gagasan sehari-hari pada peristiwa masa lalu menjadikan pengetahuan sejarah menjadi hilang. *Materi kedua* adalah disposisi sejarah. Seorang siswa yang dikatakan memiliki kecakapan literatur sejarah apabila siswa telah memiliki disposisi tertentu, termasuk kepedulian terhadap kebenaran dan argumen yang valid, dan menghormati orang di masa lalu

¹⁷ Lorenz, C. "Historical knowledge and historical reality: a plea for "internal realism". *History and Theory*, 1994: 297-327.

seperti menghormati manusia di masa kini. *Materi ketiga* adalah konsep substansial. Pembelajaran kecakapan literatur sejarah ingin membentuk siswa yang memiliki *pemahaman mendalam* atas sejarah yaitu jenis pemahaman yang menyebabkan seseorang mampu mengubah informasi faktual menjadi pengetahuan yang berguna.¹⁸ Pemahaman yang mendalam akan tercapai apabila siswa menguasai berbagai konsep yang berkaitan dengan materi sejarah, konsep substantif sejarah.

Konsep substantif terdiri dari jenis, yaitu: 1) konsep prosedural disiplin ilmu sejarah dan 2) konsep lapis kedua. Konsep seperti revolusi industri, pencerahan, atau perang dingin, oleh Walsh disebut *colligatory concept*, yaitu konsep yang diperoleh dari pengorganisasian fenomena spesifik dalam rangka membuat suatu proses dan peristiwa mudah dipahami, secara relatif oleh sejarawan. Kemampuan untuk menguasai *colligatory concept* secara tepat berperan sebagai kunci utama untuk membuat siswa mampu memahami masa lalu sejarah.

Penggunaan istilah “kecakapan literatur sejarah” menuntut pengajaran kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan itu disebut juga sebagai *kesadaran sejarah aktif* sebagai pusat orientasi diri tentang waktu, sikap yang

tidak memisahkan memisahkan masa lalu dari masa kini dan mendatang. *Kesadaran sejarah aktif* menuntut pemahaman atas *konsep lapis-kedua*. Konsep lapis kedua adalah pemahaman tentang waktu sejarah yaitu pemahaman tentang *perubahan, perkembangan, dan kesinambungan* dalam sejarah. Ketiga konsep itu adalah kerangka pengetahuan sejarah yang menjadikan siswa dapat membangun *gambaran besar* masa lalu manusia, juga pengetahuan yang lebih rinci tentang bagian dari masa lalu dipelajari dalam skala yang lebih kecil (*gambaran kecil*).¹⁹ Betapa pentingnya pemahaman akan waktu, karena pemahaman yang salah tentang konsep perubahan membuat sejarah tidak bisa dipahami atau tidak berguna. Jelas bahwa konsep lapis kedua adalah peralatan konseptual penting yang harus dikuasai siswa untuk dapat memahami sejarah.

Dalam hal pedagogi, kemampuan guru dalam didaktik dan metodik sama-sama penting. Mengingat pembelajaran sejarah harus dapat meningkatkan pemahaman konseptual tentang sejarah dan dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan bukti empiris tentang keadaan dan karakteristik siswa, maka guru sejarah sejarah menguasai disiplin ilmu

¹⁸ Donovan, M. S., Bransford J. D., and Pellegrino J. W. (eds). *How People Learn: Bridging Research and Practice*. (Washington DC: National Academy Press, 1999), h. 12.

¹⁹ Shemilt. “Drinking an ocean and pissing a cupful”, dalam Symcox, L. and A. Wilschut (eds). *National History Standards: The Problem of the Canon and the Future of Teaching History: International Review of History Education*. (Charlotte: Information Age Publishing, 2009), h. 76.

sejarah, juga teori belajar. Tampaknya guru harus mampu mengelola kegiatan kelas dengan cerdas sehingga dapat membentuk pemahaman sejarah siswa. Hal itu tidak akan tercapai jika guru berpegang teguh pada tingkat berfikir rendah. Guru yang mengendaki siswa memiliki gagasan tingkat tinggi perlu memperlakukan siswa sebagai orang dewasa, mulai dari menyarankan apa yang harus dibaca, dibandingkan mengajarkan sekumpulan istilah. Guru perlu refleksif dan mendorong pemikiran ke arah jenis pengetahuan yang kita sebut sebagai *pemahaman teoretis*. Mungkin yang terjadi pada guru sejarah saat ini menanggapi dirinya telah mengajarkan kecakapan literatur sejarah, tetapi pada kenyataannya tidak mampu membentuk intelektual siswa, bahkan lebih rendah dari tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum.

Untuk mencapai kesuksesan penerapan tradisi alternatif, setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi guru sejarah. *Pertama*, penguasaan atas ketiga jenis pengetahuan tentang sejarah, yaitu: 1) substantif, 2) prosedural, dan 3) konsep disiplin ilmu sejarah adalah tantangan bagi guru. Bisa jadi, guru sejarah ingin menerapkan pendekatan pembelajaran berorientasi kecakapan literatur sejarah, dalam praktiknya hanya *story telling* yang berbasis pengetahuan hafalan.

Kedua, guru dituntut untuk mengenali karakter masing-masing siswa setidaknya pada dua hal, yaitu: 1) bagaimana cara siswa belajar, dan; 2)

bagaimana pemahaman siswa tentang sejarah. Semua guru sudah dipastikan mempelajari teori belajar, meskipun kemampuan praktis mengajar tidak selalu sama dengan pemahaman mereka tentang teori belajar, bahkan cenderung hafalan saja. Seyogyanya bahwa pengetahuan tentang praktis teori belajar harus terkait dengan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah. Pengetahuan tentang cara siswa belajar dan membelajarkan siswa dan pengetahuan tentang sejarah adalah dua variabel yang sangat menentukan keberhasilan pendekatan pembelajaran berorientasi intelektual.

Berada di Posisi Kurikulum Sejarah Pada Kurikulum 2013?

Mengingat pentingnya kompetensi sikap, dalam Kurikulum 2013 rumusan kompetensi sikap dinyatakan secara eksplisit. Bukan hanya itu, kompetensi sikap (*attitude*) dipecah menjadi dua, yaitu (1) sikap agama dan (2) sikap sosial, dua kompetensi lain yaitu kompetensi pengetahuan (3) dan kompetensi keterampilan (4), KI menjadi empat, disingkat P-S-S-K. Rumusan kompetensi P-S-S-K dari Kurikulum Sejarah dalam Kurikulum 2013 (*Lihat Lampiran 1*). Bacalah dan perhatikan dengan seksama rumusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013 dalam konteks Mapel Sejarah Kelas X SMA/MA. Para pengusung mengklaim Kurikulum 2013 terpadu. Penulis mengartikan terpadu sebagai keterkaitan-saling

mempengaruhi secara vertikal antara kompetensi P-S-K dalam KI dan dan horizontal antara KI dengan KD. Penulis tidak menemukan kesinambungan antar-rumusan pada kompetensi P, kompetensi S dan kompetensi K. Penulis menganggap hubungan antara KI-2 dan KD-2.1 adalah hubungan umum-khusus dan khusus-umum yang bersandarkan pada penalaran induktif deduktif. Dalam rumusan kompetensi, KI-2 adalah pernyataan umum dan rumusan KD-2.1 adalah khusus yang diturunkan dari pernyataan umum. Bahkan antar KD sama sekali tidak ada jenis hubungan keterkaitan saling mempengaruhi.

Mengapa dalam Kurikulum 2013, hubungan antar-kompetensi bukan terpadu? Menurut hemat penulis hal itu terjadi sebagai akibat dari keinginan menggabungkan dua tradisi pendekatan pembelajaran sejarah. Dalam rumusan kompetensi (KI dan KD), nampak bahwa *Kompetensi Sikap* berciri tradisi utama. Tetapi kompetensi pengetahuan dan keterampilan adalah rumusan kompetensi yang berciri tradisi alternatif. Kompetensi Sikap (agama dan sosial) kelihatan terlalu dipaksakan, karena uraian kompetensi Sikap yang tertuang dalam KD sama sekali tidak berkaitan dengan rumusan *Kompetensi Pengetahuan*. Logika kurikulum, sikap seseorang berhubungan dengan pengetahuan, *Sikap* sebagai akibat dari apa yang diketahui. Mengingat antara *Sikap* dan *Pengetahuan*, masing-masing berasal

dari tradisi yang berbeda dan tidak terpadu maka secara substansi Kurikulum 2013 bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua tradisi pendekatan pembelajaran sejarah yang saling bertentangan. Pertentangan itu bersumber dari perdebatan dalam menempatkan sejarah sebagai ilmu humaniora atau ilmu sosial yang berimplikasi. Kedua tradisi berbeda karakteristik pada tiga hal, tujuan yang ditetapkan, jenis materi yang dipilih (jura pengorganisasian materi) dan metode belajar yang diterapkan.

Kurikulum 2013 nampaknya ingin memadukan dua tradisi itu, nampak dari rumusan kompetensi dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Jikalau rumusan kompetensi sikap adalah nilai moral yang diambil dari tradisi utama, sedangkan rumusan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mengambil ciri dari tradisi alternatif. Usaha memadukan kedua tradisi memang tidak salah, tetapi nampak tidak logis, karena dalam logika kurikulum bahwa kompetensi Sikap adalah turunan dari kompetensi pengetahuan. Dalam kurikulum 2013, nampak bahwa rumusan kompetensi Sikap dan Pengetahuan sama sekali tidak berhubungan. Tidak ada rumusan kompetensi Pengetahuan yang dapat mendukung pencapaian pada kompetensi Sikap, karena kompetensi

Pengetahuan mengambil ciri dari tradisi alternatif yang mengusung kompetensi sejarawan. Sementara itu, sikap moral tidak menjadi bagian dari kompetensi seorang sejarawan. Sikap moral berasal dari interpretasi moral dan salah jika seorang sejarawan mengkaji sejarah menggunakan interpretasi moral karena dapat menggerus objektivitas. Sejarawan bukanlah pemutus perkara moral atau hakim moral yang bertugas memutuskan benar atau salah, baik atau buruk.

Walaupun demikian, baik tradisi utama atau tradisi alternatif, juga Kurikulum 2013, memiliki cita-cita yang harus didukung guru. Melalui makalah ini diharapkan pembaca [guru sejarah] dapat menentukan pilihan yang terbaik. Mengingat kesuksesan pelaksanaan pengajaran baik menurut kedua tradisi itu atau Kurikulum 2013 sangat tergantung pada guru, semua pendekatan menuntut guru menguasai ilmu sejarah dan menguasai metode didaktik dan metodik. Betapapun hebatnya rumusan tujuan belajar sejarah, tidak akan terwujud apabila guru tidak memiliki kemampuan untuk menguasai disiplin ilmu bidang studi dan ilmu mengajar.

REFERENSI

- Arthur, J., Davies, I., Kerr, D. and Wrenn, A. (2000). *Citizenship Through Secondary History*. Routledge: London
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013). *Kompetensi Dasar SMA/MA Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Barton, K. C. and Levstik, L. S. (2004). *Teaching History for the Common Good*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Brown, David. (1994). *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Carr, E. H. (1961). *What is History?*. London: Penguin.
- Collingwood, R.G. (1993). *The Idea of History*. Oxford: OUP.
- Donovan, M. S., Bransford J. D., and Pellegrino J. W. (1999). (eds). *How People Learn: Bridging Research and Practice*. Washington DC: National Academy Press.
- Green, Andy. (1997) "Education and State Formation in Europe and Asia", dalam Kennedy, K. (ed.). *Citizenship Education and the Modern State*. New York: Falmer Press.
- Halstead, M. and Taylor, M. "Learning and teaching about values". *Cambridge Journal of Education*, 2000: 169-202 (132).
- Hobsbawm, Eric. (1990). *Nations and Nationalism Since 1780*. Cambridge: CUP 'Canto'.
- Kinloch, N. (2001). "Parallel catastrophes? Uniqueness,

- Redemption and the Shoah”, *Teaching History*.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kurikulum Tingkat SMA/MA, Pusat Kurikulum dan Perbukuan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, diunduh, 28 April 2013.
- Lorenz, C. “Historical knowledge and historical reality: a plea for “internal realism”. *History and Theory*, 1994: 297-327.
- Maxwell, B. “Justifying educational acquaintance with the moral horrors of history on psychosocial grounds: Facing History and Ourselves in critical perspective.” *Ethics and Education*, 2008.
- Phillips, Robert. *History Teaching, Nationhood and the State*. London: Cassell, 1998.
- Salmons, P. “Teaching or preaching? The Holocaust and intercultural education in the UK”, *Intercultural Education*, 2003: 139-149 (143).
- Shemilt. “Drinking an ocean and pissing a cupful”, dalam Symcox, L. and A. Wilschut (eds). *National History Standards: The Problem of the Canon and the Future of Teaching History: International Review of History Education*. Charlotte: Information Age Publishing, 2009.
- Slater, (ed.). *Teaching History in the New Europe*. London: Council of Europe, 1995.
- Smith, R. I. “Values in history and social studies”, dalam